



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
~~BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI~~
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - g. Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah;

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

; Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat

memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat;
- 5) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasuruan;
- 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 3) menetapkan kinerja individu;
- 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;
- 2) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- 3) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- 4) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan pimpinan;
- 5) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 6) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme di wilayah KPU Kabupaten Pasuruan;
 - 3) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
- g. Agen Perubahan
 - 1) membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan;
 - 2) merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi

Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama tim Reformasi Birokrasi; dan

- 3) melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 06 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH			
1.	Ainul Yaqin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Pengarah
2.	Eriek Zainuri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Pengarah
3.	Fatimatuz Zahro	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Pengarah
4.	Muhammad Derajad	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Pengarah
5.	Mochamad Rois	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Sherla Rusdianto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Anik Farida	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nila Vania Utami Dewi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Muhammad Assegaf Purnomo Aji	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Mu'izz Hidayat	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Nafis Zamani Alfiansyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Feni Yudi Ariyanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Shinta Dwi Adinda	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Agung Mulyono	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Vindi Eka Safitri	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Moh. Hamidatul Khoir	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Nurhayati Madjodjo	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
7.	Novianto Indra Kusuma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	David Wijaya Mahendra	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Agung Ade Prakoso Haryanto	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	Nurul Fatimah	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	Barda Suraidah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Yetty Sulistyowati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Dwi Widoyoko	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Achmad Syaifullah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Muhammad Hasan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	Aang Kurniawan Saputro	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	Adi Surya Wiryawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18.	Diajeng Sukma Ayu Fitri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Nurhayati Madjodjo	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Novianto Indra Kusuma	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	David Wijaya Mahendra	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Agung Ade Prakoso Haryanto	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Nurul Fatimah	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Feni Yudi Ariyanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Shinta Dwi Adinda	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Agung Mulyono	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Vindi Eka Safitri	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Moh. Hamidatul Khoir	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Barda Suraidah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Yetty Sulistyowati	Staf Sub Bagian Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Dwi Widoyoko	Staf Sub Bagian Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Achmad Syaifullah	Staf Sub Bagian Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Muhammad Hasan	Staf Sub Bagian Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Aang Kurniawan Saputro	Staf Sub Bagian Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Adi Surya Wiryawan	Staf Sub Bagian Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Diajeng Sukma Ayu Fitri	Staf Sub Bagian Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Anik Farida	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nila Vania Utami Dewi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Muhammad Assegaf Purnomo Aji	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Mu'izz Hidayat	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Nafis Zamani Alfiansyah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Barda Suraidah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yetty Sulistyowati	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Dwi Widoyoko	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Achmad Syaifullah	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Muhammad Hasan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Aang Kurniawan Saputro	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Adi Surya Wiryawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Diajeng Sukma Ayu Fitri	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
VII. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Sherla Rusdianto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan	Koordinator merangkap Anggota
2.	Anik Farida	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Barda Suraidah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Feni Yudi Ariyanto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Nurhayati Madjodjo	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AINUL YAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

